

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Email: info@pt-bandung.go.id

Website: <http://pt-bandung.go.id>

REVIU RENCANA STRATEGIS [RENSTRA] TAHUN 2015-2019



PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Jalan Cimuncang No.21 D Bandung
Telp. 022-87832124 Fax. 022-87832125
e-mail: info@pt-bandung.go.id



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaannirrohiim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2015 - 2019.

Pengadilan Tinggi Bandung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Bandung.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung ini disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini kedepannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.



Bandung, Februari 2020
KETUA,
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

H. ABDUL KADIR, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	9
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	9
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	9
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	10
D. Tantangan yang Dihadapi (<i>Threats</i>)	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	12
2.1. Visi	12
2.2. Misi	14
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	14
2.4. Indikator Kinerja Utama	14
2.5. Program dan Kegiatan	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Bandung.....	17
1. Peningkatan Kinerja	17
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	17
BAB IV PENUTUP	18

LAMPIRAN :

Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019

S.K. Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

S.K. Penetapan Reviu Renstra (Renstra) Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung di bentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang Secara administratif berada pada wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF PROVINSI JAWA BARAT

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
1	Kabupaten Bandung	Soreang	1.767,96	3.522.724	31
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	1.305,77	1.616.203	16
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	1.224,88	2.554.376	23
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	2.710,62	4.246.307	40
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	1.414,71	1.228.294	27
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	3.840,16	2.246.663	32
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	984,52	2.099.089	40
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	3.074,07	2.210.017	42
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	2.040,11	1.845.205	31
10	Kabupaten Karawang	Karawang	1.652,20	2.110.476	30
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	1.110,56	1.132.610	32
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	1.204,24	1.266.981	26

13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	1.010,00	406.898	10
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	825,74	912.708	17
15	Kabupaten Subang	Subang	1.893,95	1.552.925	30
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	4.145,70	2.523.992	47
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	1.518,33	1.135.818	26
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	2.551,19	1.713.677	39
19	Kota Bandung	-	167,67	2.404.589	30
20	Kota Banjar	-	113,49	201.191	4
21	Kota Bekasi	-	206,61	2.409.083	12
22	Kota Bogor	-	118,5	1.005.012	6
23	Kota Cimahi	-	39,27	532.988	3
24	Kota Cirebon	-	37,36	325.767	5
25	Kota Depok	-	200,29	1.809.120	11
26	Kota Sukabumi	-	48,25	334.033	7
27	Kota Tasikmalaya	-	171,61	692.567	10

**SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KLAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung. Kota Cimahi. Kabupaten Bandung Barat.	IA
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IB
6	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
7	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
8	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IB
9	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IB
10	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB
11	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
12	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya	IA

13	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis Kabupaten Pangandaran	IB
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
20	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
21	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB
22	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II
23	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	II

Pengadilan Tinggi Bandung selaku kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas menyelenggarakan administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana, Hukum dan TIPIKOR, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pegawai/Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak tetap.

Sesuai Laporan Tahun 2018, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Bandung sebanyak 116 (seratus enambelas) orang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NIP BARU	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	19540718 198103 1 008	H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.	IV/e	KETUA	S2
2	19570303 198303 1 007	H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.	IV/e	WAKIL KETUA	S2
3	19540122 198101 1 001	RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
4	19571019 198403 1 002	SYAFARUDDIN, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
5	19551229 198303 2 002	Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
6	19540131 198103 1 001	AMAN BARUS, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
7	19580424 198303 1 004	H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
8	19550304 198503 1 006	SUBARYANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
9	19570703 198403 1 001	UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
10	19541205 198403 1 002	PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
11	19531023 198403 1 003	EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
12	19550313 198403 1 003	SIR JOHAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
13	19561102 198403 1 002	H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
14	19550728 198403 1 003	H. YULIUSMAN, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
15	19571212 198403 1 004	BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
16	19550419 198403 1 001	SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
17	19560405 198403 1 001	AGOENG RAHARDJO, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
18	19580421 198403 2 002	ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
19	19570717 198403 1 004	H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
20	19570817 198103 1 041	ABDUL FATTAH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
21	19580914 198403 1 001	HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
22	19540407 198503 1 002	LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
23	19570314 198503 1 002	CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
24	19540522 198203 1 009	H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
25	19541105 198403 1 002	MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
26	19581123 198512 1 001	NELSON PASARIBU, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
27	19580816 198503 1 001	AGUS HARIYADI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
28	19530212 198503 1 001	TANI GINTING, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
29	19550908 198512 1 001	Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
30	19570101 198503 1 001	JOKO SISWANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
31	19580828 198503 1 005	ZAHERWAN LESMANA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
32	19580125 198503 1 002	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
33	19571129 198503 1 001	MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
34	19570321 198503 1 005	HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
35	19610607 198503 1 001	DR. HERY SUPRIYONO, S.H.,	IV/e	HAKIM TINGGI	S2

		M.Hum.			
36	19600911 198503 2 002	Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
37	19580422 198601 1 003	H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
38	19540525 198603 1 001	Dr. EDUARD DIXON PATTINASARANY, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
39	19561226 198512 1 001	IMAM SYAFII, S.H., M.Hum	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
40	19590113 198512 1 001	DEHEL K. SANDAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
41	19530421 198612 1 001	FIRZAL ARZY, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
42	19620607 198612 2 001	NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
43	19620225 198803 1 002	BUDI SANTOSO, S.H., M.H.	IV/d	HAKIM TINGGI	S2
44	-	AFNINUR KAMAROESID, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S1
45	-	Dr. Hj. ELIS RUSMIATI, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S3
46	-	H. MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
47	-	DICKY RISMAN, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
48	-	Dr.Hj.UMMI MASKANAH, SH.,M.Hum.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S3
49	-	Drs. HARIRI YS, S.H., M.H., M.M.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
50	-	SUDIRO, S.H., M.Hum.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
51	-	Hj. LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
52	19601225 198803 1 003	HANDOKO KRISTIYOSO, S.H. MBL., M.Hum.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S2
53	19620207 198803 2 002	TITI MARIA ROMLAH, S.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S1
54	19610518 199212 1 001	UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, S.H.	IV/c	HAKIM YUSTISIAL	S1
55	19590301 198503 1 006	SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.	IV/c	PANITERA	S2
56	19600601 199103 1 002	Drs. SUBARJI, S.H.	IV/c	SEKRETARIS	S1
57	19581130 198103 1 007	BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H., M.H.	IV/c	PANMUD PIDANA	S2
58	19590608 198502 2 001	Hj. R IIN MUTMAINAH, S.H., M.H.	IV/b	PANMUD HUKUM	S2
59	19630304 198303 1 005	Dr. SUGENG TARSONO S, S.H.,M.H.	IV/b	PANITERA PENGGANTI	S3
60	19641225 199103 2 002	RATNA SUMINAR, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
61	19580517 198502 1 001	IWAN DARMAWAN, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
62	19620220 198303 2 005	Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
63	19610407 198311 1 001	ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2

64	19580812 198303 2 007	Dra. Hj. NUR'AINI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
65	19621109 198303 1 008	H. MARDONO, S.H., M.H.	IV/a	PANMUD PERDATA	S2
66	19620716 198303 2 002	SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
67	19651206 198502 2 001	Hj. TRI MULYANI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
68	19600109 199103 1 003	MOCHAMAD TIERE, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
69	19660617 198502 1 001	Drs. BARNAS, S.H.	IV/a	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	S1
70	19601212 198403 1 004	H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
71	19630503 198303 1 005	BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
72	19741215 200112 1 001	DANIEL ELISA SETIAWAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	IV/a	HAKIM YUSTISIAL	S1
73	19760227 200112 1 002	WISNU GIRI PRASETYO, S.H.	IV/a	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	S1
74	19600421 198503 1 004	NENYO APRILSANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
75	19581015 198503 1 005	TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
76	19621010 199203 1 007	H. NANANG PRIATNA, S.H.	III/d	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	S1
77	19600212 199203 1 002	H. APAY SYAHIDIN, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
78	19590627 198103 1 002	SUTIKNO, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
79	19600805 198003 2 002	DENI SETIANI, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
80	19590612 198103 1 006	SUKARJO, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
81	19580730 198103 1 001	ABDUL FATTAH, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
82	19650814 199803 1 004	BAMBANG BELARDAYA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
83	19580504 198203 2 003	Hj. FARIDA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
84	19660529 199303 1 007	YANA HEDIYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
85	19660713 199003 1 004	SAIFUL ASNURI, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
86	19720207 199403 1 003	ASEP GUNAWAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
87	19650301 198501 2 001	NURDIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1
88	19670905 200112 1 002	H. KAIRUL FASJA, S.H.	III/d	PANITERA PENGANTI	S1

89	19730306 200604 1 002	SRI SURATNO WIBOWO, S.T.	III/d	KASUB BAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	S1
90	19751230 200604 2 001	UMMI HANI, S. Sos.	III/d	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S1
91	19761109 200604 2 005	ARY FARIDAH, S.Si.	III/d	KASUB BAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN	S1
92	19810222 200604 1 005	ANTON SENJAYA, S.Kom., SH.	III/d	STAF	S1
93	19770729 200502 1 002	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	III/d	KASUB BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	S1
94	19830626 200604 2 004	FITRI KRISTIANI, S.E., Ak.	III/d	STAF	S1
95	19720709 199203 2 001	EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S2
96	19680809 199303 2 004	HENDAYANI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
97	19591108 198202 2 001	S A L E H A	III/c	PANITERA PENGGANTI	SMA
98	19600212 198303 1 006	H. SOETJIPTO	III/c	PANITERA PENGGANTI	SMA
99	19790213 200012 2 002	NINIK KUNCAYANI, S.H.	III/c	STAF	S1
100	19810901 200904 1 003	ALJUNALLIADI, S.E., S.H.	III/c	STAF	S1
101	19830906 200904 2 005	ELNA HELNIARIKA, S.Kom.	III/c	STAF	S1
102	19841009 200904 1 003	GALIH SAMSURIZAL, S.Kom.	III/c	STAF	S1
103	19860410 200912 1 002	SIDIK NUGRAHA, S.Kom.	III/c	PRANATA KOMPUTER	S1
104	19830411 200912 2 004	APRIYANI ADI UTAMI, S.E.	III/c	STAF	S1
105	19831116 200912 2 003	NURHAFINA NOVIANA, S.E.	III/c	STAF	S1
106	19630828 198303 2 003	MARYUNAH	III/b	STAF	SMA
107	19621119 199203 2 001	MUBANDIYAH	III/b	STAF	SMA
108	19690202 199403 2 004	LIES HENDRAWANI	III/b	STAF	SMA
109	19720615 199403 2 003	LISNA INDRAWATI	III/b	STAF	SMA
110	19660612 199303 1 005	JUJU SUTRISNA	III/b	STAF	SMA
111	19821123 200912 1 001	INU NURHIDAYAT, S.Pd., S.H.	III/b	STAF	S1
112	19910302 201503 2 002	DINY KULSUMIAWATY, S.H.	III/b	STAF	S1
113	19840527 201101 1 012	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	III/b	PRANATA KOMPUTER	S1
114	19760605 200112 1 003	R O M L I, S.H.	III/b	STAF	S1
115	19790516 200904 1 004	ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.	III/a	STAF	D3

Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim Tinggi	: 37 Orang
Hakim Adhoc Tipikor	: 8 Orang
Hakim Yustisial	: 4 Orang
Panitera	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Panitera Muda	: 4 Orang
Kepala Bagian	: 2 Orang
Kepala Sub Bagian	: 4 Orang
Panitera Pengganti	: 28 Orang
Staf	: 24 Orang

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di PengadilanTinggi Jawa Barat adalah berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

NO.	NAMA
1	WAWAN SETIAWAN
2	CECEP SURAHMAN
3	TENDI KOSTAMAN
4	DEDI LUSIYANA
5	DEDI IRAWAN
6	AHMAD ISKANDAR
7	DADANG ANWAR
8	EDDY EFFENDI
9	NANTA SUWARNA
10	SUBIANA
11	HERI SUPRIYADI
12	SAEFUL FAUZI SOBARI, SH.
13	YUDHI DARMAWAN, SH.
14	AHMAD SOLIHIN
15	HEDI
16	WINA YUSTIDAMAYANTI, S.I.Kom.
17	WIDA AMELIA, S.IP.
18	FATHIA FARAHNASH, A.Md.Ak.
19	ASYILAH AZIZAH YASMIN, S.Pd.
20	NOVIA NI'MATUL MAULA, S.H.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan (*Voorj Post*) di wilayah propinsi Jawa Barat.
2. Pengadilan Tinggi Bandung merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Jawa Barat.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Bandungs selaku Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengaduan masyarakat bisa dilakukan dengan sistem yang berbasis teknologi informasi

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Bandung belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Bandung
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem Manajemen perkara berbasis teknologi informasi (dalam

proses)

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Bandung berupa internet, website Pengadilan Tinggi Bandung.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Tinggi Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Bandung membutuhkan waktu lebih lama.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2015- 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bandung,yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi Efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung ini harus didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung.

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

URAIAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN	1. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN 2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

AKUNTABEL	3. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA 4. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM: - KASASI - PK 5. INDEX RESPONDED PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	1. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU 2. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat Waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Meng-upload perkara ke website.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama antara lain sedang membangun / menambah sistem IT yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN:

- 1. Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019**
- 2. S.K. Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019**
- 3. S.K. Penetapan Reviu Renstra (Renstra) Tahun 2015-2019**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Nomor : WI1.U1223JOT.01.2/XII/2019

Tanggal : 10 Desember 2019

Tentang : PENETAPAN REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung

Misi:

1. Menaga kemardian badan peradilan

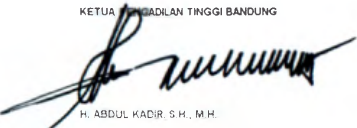
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis								
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Matriks Pendanaan (Rupiah)				
															2015	2016	2017	2018	2019
1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI Keadilan	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	85%	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pertemuan, Administrasi dan Pengawasan Keuangan Badan Penyelenggara	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	100%	25 127 534 000	32 045 874 000	34 880 068 000	32 404 081 000	37 005 358 000
					b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	86%	88%	90%	92%									
					c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	5%	5%	10%	4,5%									
					d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	60%	60%	65%	70%	55%									
					100%	100%	100%	100%	100%										
2	SETIAP PENCARI Keadilan DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	82%	84%	88%	98%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	PRESENTASE INDEKS KEPUASAN PENCARI Keadilan	100%	517 970 000	436 530 000	520 060 000	1 105 000 000	179 500 000
					a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%									
					b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0%	100%	100%									
											Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengadaan Manajemen Peradilan Umum	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	4 917 500 000	110 000 000	273 750 000	589 865 000	247 800 000

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG



H. ABDUL KADIR S.H., M.H.

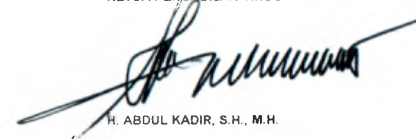
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

Visi:
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung
Misi:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategie									
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Matrike Pendanaan (Rupiah)					
															2016	2016	2017	2018	2019	
1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	85%	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	100%	25.127.534.000	32.045.874.000	34.660.066.000	32.404.081.000	37.005.358.000	
					b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	86%	88%	90%	92%										
					c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	5%	5%	10%	4,5%										
					d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none">- Kasasi- PK	60%	60%	65%	70%	55%										100%
					e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	82%	84%	88%	98%										
2	SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	4.917.500.000	110.000.000	273.750.000	589.865.000	247.600.000	
					b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0%	100%	100%										

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG


H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: www.pt-bandung.go.id

Email: info@pt-bandung.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR: W11.U//22/OT.01.2/12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Membaca** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.3/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut,
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

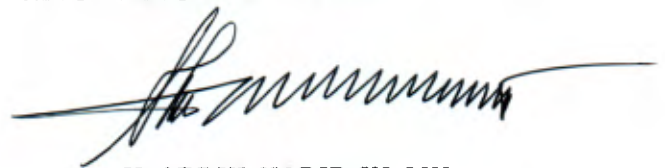
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Pertama :** Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Bandung;
- Kedua :** Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Ketiga :** Setiap perkembangan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG



H. ABDUL KADIR,SH.,MH.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: W11.U/ /OT.01.2/12/2019
TANGGAL 10 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
2015-2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Pengarah : Hakim Tinggi Pengawas Bidang

Penanggung Jawab : 1. Panitera
2. Sekretaris

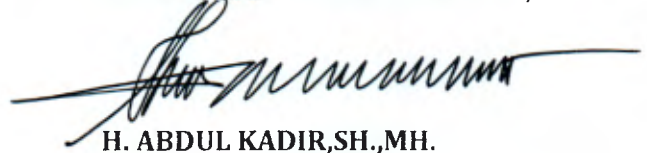
Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan : Wakil Panitera

Anggota Tim Bidang Kepaniteraan :
1. Panitera Muda Perdata dan Staf
2. Panitera Muda Pidana dan Staf
3. Panitera Muda Hukum dan Staf
4. Panitera Muda Tipikor dan Staf

Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan : 1. Kabag Umum dan Keuangan
2. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

Anggota Tim Bidang Kesekretariatan :
1. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Umum dan Staf
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Staf
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan Staf

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,



H. ABDUL KADIR,SH.,MH.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: www.pt-bandung.go.id

Email: info@pt-bandung.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : W11.U//223/OT.01.2/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Menimbang : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.3/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Bandung;
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama

7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
8. Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang
9. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana
10. Pembangunan Jangkah Menengah Nasional tahun 2004-2009
Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

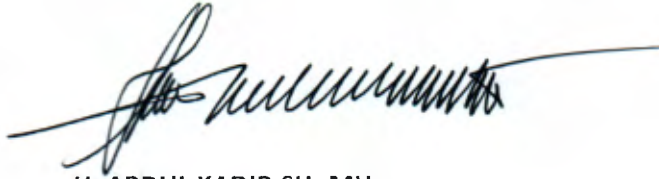
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
- Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung 2015 – 2019.
- Kedua : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dilakukan oleh Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 pada Pengadilan Tinggi Bandung dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang terkait pada Pengadilan Tinggi Bandung diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 satuan kerja Pengadilan Tinggi Bandung atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 10 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'H' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. ABDUL KADIR,SH.,MH.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;

LEWIS & CLARK MUSEUM
BANDUNG
Jalan Cemerlang No. 10 Bandung
Telp. 022-8787112 Fax 022-8787113
e-mail: lewis-clark-museum@gmail.com

